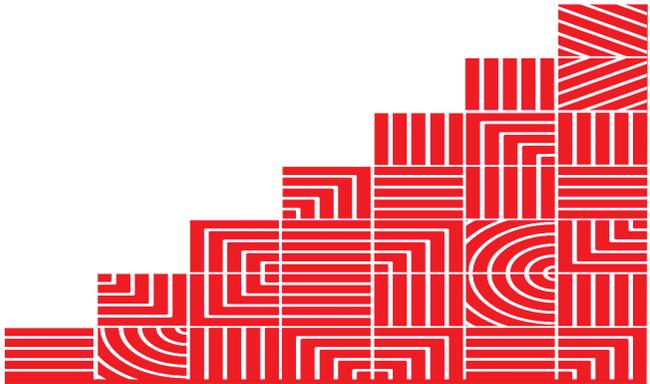
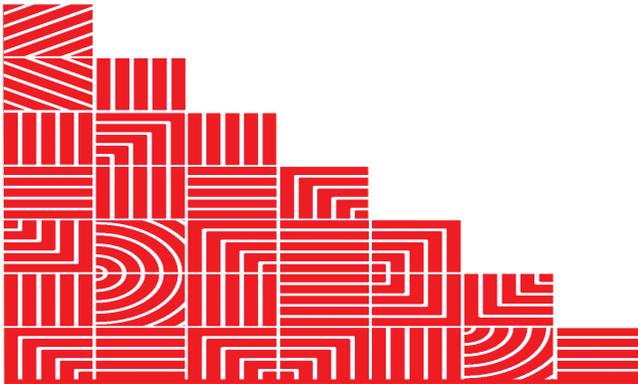


PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN



PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

Pembangunan nasional harus dapat menghilangkan/memperkecil kesenjangan yang ada. Upaya pengurangan kesenjangan antarkelompok pendapatan dilakukan dengan memperbaiki distribusi pendapatan sehingga pendapatan penduduk kelompok 40% terbawah dapat tumbuh jauh lebih baik. Sementara itu, upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah diselenggarakan dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan Kawasan Timur Indonesia.

Ketimpangan Antarkelompok Masyarakat. Selama kurun 2012-2015, ketimpangan pendapatan yang diukur menggunakan koefisien gini menunjukkan tren yang cenderung stagnan di atas 0,40. Pada 2017 koefisien gini berhasil turun 0,004 poin dari 0,397 pada Maret 2016 menjadi 0,393 pada Maret 2017. Sementara itu, persentase pengeluaran pada kelompok 40% menengah naik dari 17,02% (Maret 2016) menjadi 17,12% (Maret 2017), sedangkan kelompok 20% teratas mengalami penurunan sebesar 0,45%.

Pengembangan Wilayah. Sampai dengan tahun 2016, perkembangan kinerja pembangunan daerah terus meningkat, baik diukur dari pertumbuhan produksi, penurunan kemiskinan, dan pengangguran. Kinerja pembangunan daerah di Kawasan Barat Indonesia (KBI) relatif lebih baik dibanding Kawasan Timur Indonesia (KTI), namun mulai terjadi pergeseran kontribusi PDRB di luar Jawa dan Bali, yang ditunjukkan dengan pertumbuhan kontribusi PDRB Jawa dan Bali yang mulai melambat. Sementara itu, jumlah pengangguran tahun 2016 terkonsentrasi di Pulau Jawa-Bali, dengan jumlah terbesar berada di Provinsi Jawa Barat. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2016 menurun kecuali wilayah Kalimantan. Tingkat pengangguran terbuka Wilayah Jawa-Bali dan Maluku berada di atas rata-rata nasional sebesar 5,61%. Persentase penduduk miskin per pulau pada tahun 2016 cenderung menurun. Sementara itu, capaian pembangunan kawasan strategis dalam rangka meningkatkan pengembangan wilayah adalah ditetapkannya satu kawasan ekonomi khusus (KEK) baru tahun 2017 yaitu KEK Arun Lhokseumawe.

Otonomi Daerah. Pendapatan dalam APBD kabupaten/kota tahun anggaran 2015 terhadap tahun 2016 meningkat dari Rp630,28 triliun menjadi Rp749,44 triliun. Kontribusi rata-rata PDRD pada tahun 2015 adalah sebesar 7,46% dari total pendapatan APBD dan tahun 2016 sebesar 7,01% dari total pendapatan APBD. Secara nominal, jumlah pajak daerah dalam APBD provinsi/kabupaten/kota dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami peningkatan, sedangkan untuk retribusi daerah relatif konstan.

Perkotaan dan Perdesaan. Capaian pembangunan perkotaan hingga akhir tahun 2016 adalah: (1) Inkubasi lima kota baru publik, yaitu Pontianak, Tanjung Selor, Palembang, Manado, dan Makassar; (2) Perencanaan dan pembangunan lima Kawasan Strategis Nasional (KSN); dan (3) Optimalisasi 13 kota otonom sedang sebagai penyangga urbanisasi. Sedangkan hasil pembangunan desa dan kawasan perdesaan hingga akhir tahun 2016 adalah: (1) Pendampingan desa oleh 40.142 orang pendamping; (2) Terlaksananya penyaluran Dana Desa tahap I sebesar Rp35,22 triliun untuk seluruh kabupaten/kota penerima; dan (3) Terbentuknya 18.446 BUMDesa.

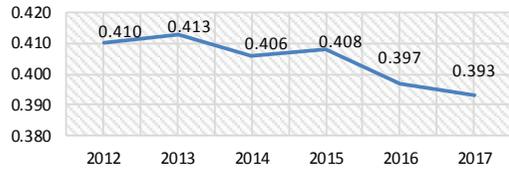
Tata Ruang, Pertanahan, Reforma Agraria, dan Informasi Geospasial . Capaian pembangunan meliputi: (1) Perkembangan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi (94%), kabupaten (90%) dan kota (95%) hingga Mei 2017; (2) Penyusunan beberapa regulasi, maupun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) bidang tata ruang, serta RTRW darat dan laut; (3) Penyusunan peta dasar pertanahan seluas 6.830 ribu ha pada 2016, peningkatan kepastian hukum hak atas tanah melalui penanganan sengketa dan konflik, redistribusi tanah, dan legalisasi aset tanah; dan (4) Pembuatan peta dasar skala 1:5.000 dari 989 nomor lembar peta (NLP) pada 2016, menjadi 1.375 NLP (2017).

Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal. Percepatan pembangunan kawasan perbatasan dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan keamanan wilayah perbatasan negara, peningkatan diplomasi batas wilayah negara, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di 150 kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara dan 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), termasuk pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu. Selanjutnya, pembangunan Daerah Tertinggal, dilakukan dengan: (1) Peningkatan pelayanan dasar; (2) Penempatan kapasitas SDM di daerah tertinggal; (3) Pembangunan ekonomi lokal; dan (4) Pembangunan sarana dan prasarana.

KETIMPANGAN ANTARKELOMPOK MASYARAKAT

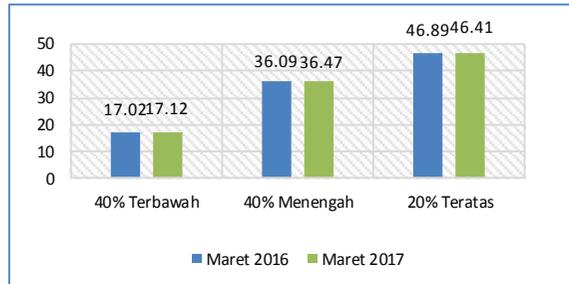
PERKEMBANGAN KOEFISIEN GINI

Perkembangan Koefisien Gini di Indonesia Tahun 2012-2017



Sumber: BPS (2017)

Distribusi Pengeluaran Antarkelompok Penduduk (Persen) Tahun 2016-2017

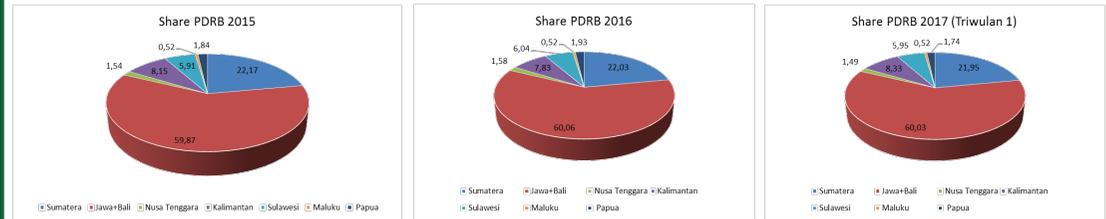


Sumber: BPS (2017)

Pada tahun 2017 koefisien gini turun 0,004 poin dari 0,397 pada Maret 2016 menjadi 0,393 pada Maret 2017 (BPS, 2017). Peningkatan pendapatan penduduk kelompok menengah ke bawah berkontribusi dalam menurunkan ketimpangan.

PENGEMBANGAN WILAYAH

PERAN WILAYAH DALAM PEMBENTUKAN PDB



Peran Wilayah Sumatera dan Jawa masih dominan dengan kontribusi >80% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)

TINGKAT PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN WILAYAH



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per pulau tahun 2016 menurun, kecuali Wilayah Kalimantan; TPT Wilayah Jawa-Bali dan Maluku masih berada di atas rata-rata nasional



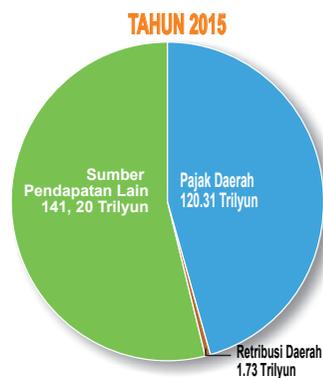
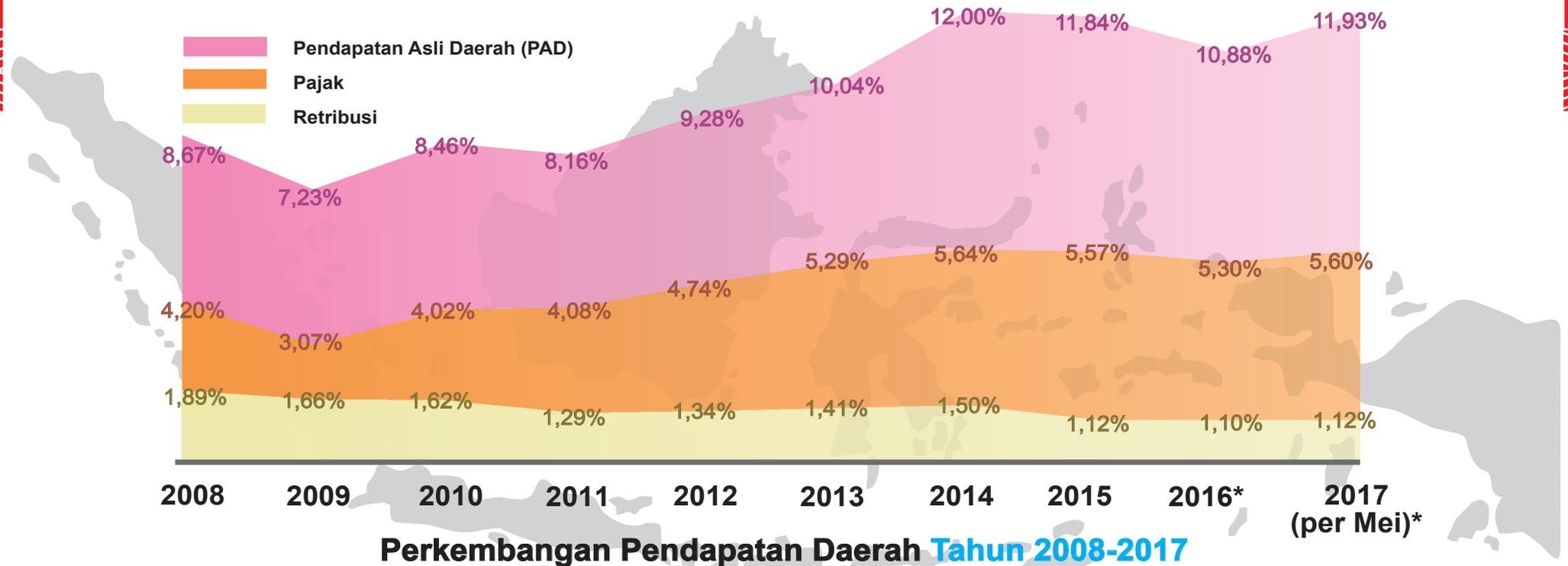
Persentase penduduk miskin per pulau tahun 2016 cenderung menurun, namun masih berada di atas rata-rata nasional, kecuali Wilayah Jawa-Bali dan Kalimantan

PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS



Penetapan KEK baru:
 • 2016: KEK Tanjung Kelayang dan KEK Sorong • Feb 2017: KEK Arun Lhokseumawe

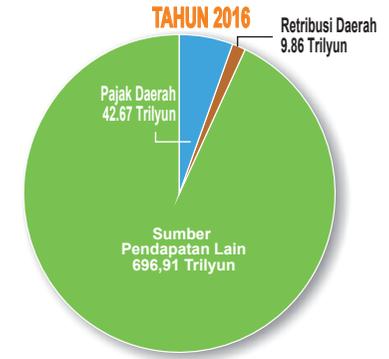
OTONOMI DAERAH



Grafik Proporsi Total Pendapatan Seluruh Provinsi Tahun 2015 dan 2016



Grafik Proporsi Total Pendapatan Seluruh Kabupaten/Kota Tahun 2015 dan 2016



PERKOTAAN DAN PERDESAAN

Perkotaan



Perdesaan



Inkubasi 5 Kota Baru Publik

Pontianak, Tanjung Selor, Palembang, Manado, dan Makassar



Pendampingan desa sebanyak

40.142 orang

Perencanaan dan Pembangunan 5 KSN Metropolitan di Luar Jawa

Mebidangro, Mamminasata, Sarbagita, Patungrayaagung, dan Bimindo



Terlaksananya penyaluran Dana Desa TA. 2017 tahap I sebesar

Rp 35,22 Triliun

kepada seluruh Kabupaten/Kota penerima

Optimalisasi 13 Kota Otonom Sedang Sebagai Penyangga Urbanisasi

Kota Sedang di Luar Pulau Jawa

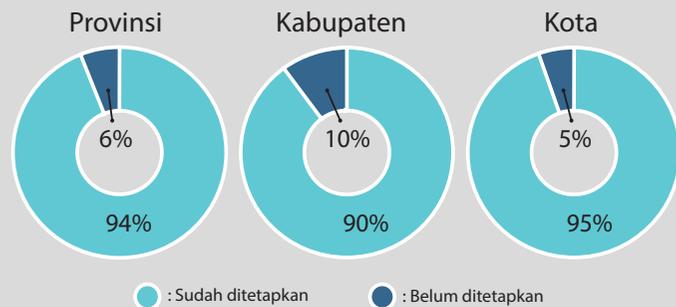


Terbentuknya

18.446 BUMDesa

TATA RUANG, PERTANAHAN, REFORMA AGRARIA, DAN INFORMASI GEOSPASIAL

Perkembangan Penetapan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota*

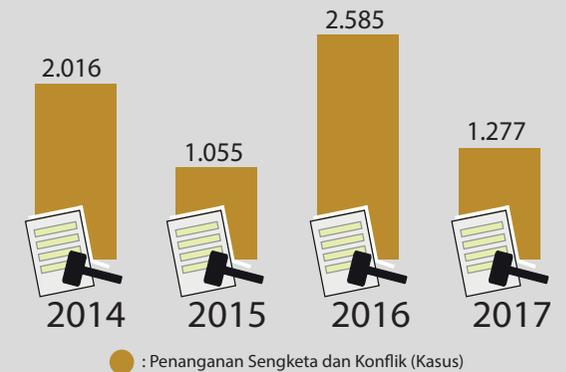


* Status Tanggal 29 Mei 2017

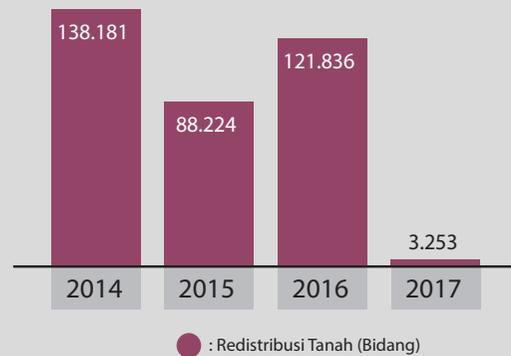
Capaian Penyusunan Peta Dasar
Pertanahan (Hektar)
Tahun 2014-2017



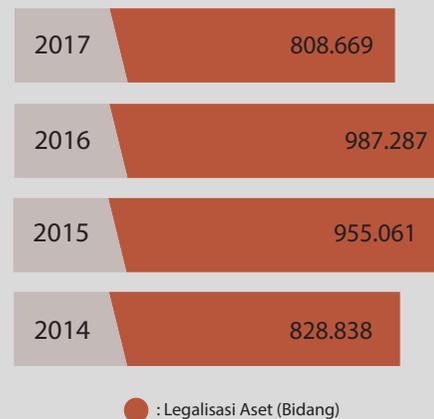
Capaian Penanganan Sengketa
dan Konflik Pertanahan (Kasus)
Tahun 2014-2017



Capaian Pelaksanaan Redistribusi Tanah (Bidang)
Tahun 2014-2017



Capaian Pelaksanaan Legalisasi Aset Tanah (Bidang)
Tahun 2014-2017



Capaian Peta Dasar Skala 1:5.000 (NLP)
Tahun 2014-2017



* Jumlah NLP di tahun 2017 merupakan target, capaian akan terlihat di akhir tahun.
Sumber: BIG, 2017

Sumber: Kementerian ATR/BPN, 2017

PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN

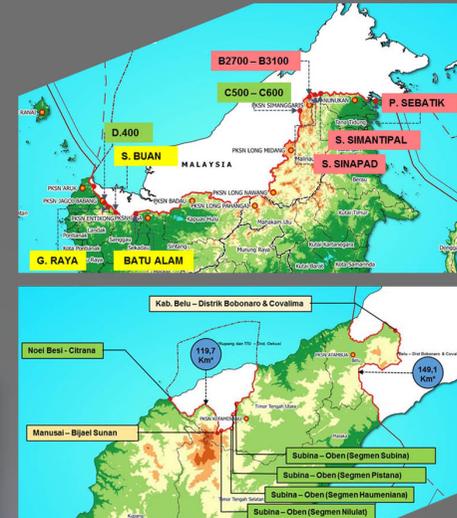


Pengelolaan Lintas Batas Negara

Pembangunan Fisik PLBN
100%

1. PLBN Aruk, Sambas, Kalbar
2. PLBN Entikong, Sanggau, Kalbar
3. PLBN Nanga Badau, Kapuas Hulu, Kalbar
4. PLBN Motaain, Belu, NTT
5. PLBN Wini, TTU, NTT
6. PLBN Motamasin, Malaka, NTT
7. PLBN Skow, Jayapura, Papua

Pengelolaan Batas Wilayah Negara



1. Upaya penyelesaian sembilan **Outstanding Border Problem (OBP)** di perbatasan Indonesia-Malaysia
2. Pemeliharaan **tanda batas negara**
3. Pembahasan dua **unresolved segment** dan empat **unsurveyed segment** di perbatasan RI - RDTL

(1) Pembangunan/peningkatan
36 bandara perintis



(2) Pembangunan jalan paralel
perbatasan di Kalimantan, NTT
dan Papua



(3) Pembangunan/peningkatan
14 pelabuhan/dermaga



(4) Pembangunan infrastruktur
energi listrik di 31 Lokpri.



(1) Rehabilitasi Sekolah Dasar (SD)



(2) Pembangunan pasar rakyat
dan pasar tradisional



(3) DAK Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar,
Bidang Kesehatan Rujukan, dan Bidang Pelayanan
Kefarmasian



(4) Pembangunan Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM), embung, jaringan pipa
distribusi, dan sarana prasarana air baku

Infrastruktur dan Pelayanan Dasar

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Pelayanan Dasar



- (1) Pembangunan 1.806 rumah bagi warga Komunitas Adat Terpencil;
- (2) Pembangunan 3 Rumah Sakit Pratama;
- (3) Pembangunan Sarana Air Bersih.

Kapasitas SDM



- (1) Penempatan 1.422 tenaga kesehatan Nusantara Sehat;
- (2) Distribusi 2.296 Sarjana Mendidik di Daerah Terluar, Terdepan dan Tertinggal (SM3T);
- (3) Distribusi 6.296 Guru Garis Depan;
- (4) Pembangunan 9 paket sarana ruang kelas baru;
- (5) Penyediaan 10 paket peralatan pendukung pusat belajar masyarakat.

Ekonomi Lokal



- (1) Bantuan 27 unit alat pasca panen;
- (2) Bantuan 5 unit sarana pengembangan industri rumah tangga;
- (3) Pemberian 11 unit bantuan traktor dan handtraktor;
- (4) Pembangunan 206 unit pasar rakyat, 7 unit pasar kecamatan;
- (5) Pengembangan 15 Sentra Kelautan Perikanan Terpadu dan penataan 100 kampung nelayan.

Sarana Prasarana

Pembangunan Intenet Masyarakat di 12 Kabupaten



Pembangunan jalan non status di 8 kabupaten



Pembangunan 3 unit tambatan perahu



Pembangunan 125 unit BTS



Pembangunan 7 unit jaringan irigasi



Pembangunan 7 unit PLTS



Pengadaan 7 unit kapal di 7 kabupaten

